

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dilihat berdasarkan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan yang belum berjalan dengan baik karena informasi yang disampaikan belum jelas, tidak utuh dan tidak konsisten, ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan telah memiliki ketersediaan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan KIA, tetapi kesiapan SDM belum terpenuhi dengan baik, disposisi dalam pelaksanaan kebijakan yang masih harus ditingkatkan kembali karena tidak konsisten dalam menyampaikan program, serta struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik karena ada SOP jelas dan melakukan fragmentasi kebijakan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
2. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi meliputi adanya regulasi yang jelas, adanya anggaran yang tersedia, serta adanya kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan sekolah. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan program KIA di Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi ini adalah komunikasi yang kurang efektif, kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang kurang optimal, serta sikap pelaksana yang tidak konsisten.

4.2 Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi agar lebih optimal dalam melaksanakan kebijakan program KIA, terutama dari segi kesiapan SDM, penyampaian informasi dan konsistensi terhadap manfaat program KIA agar implementasi kebijakan program KIA dapat berjalan dengan baik dan sesuai tujuan pemerintah.
2. Perlu adanya upaya yang lebih spesifik dalam mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program KIA, sehingga seluruh masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi mengenai program KIA.
3. Membuka ruang-ruang bentuk kontrol agar menjamin setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat, sehingga fungsi kebijakan berjalan sesuai keinginan masyarakat.